

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN

Amir Chalis Andriyansyah

Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya
amirandriyansyah@mhs.unesa.ac.id

Abstract: Education has a very important role in the development of quality human resources (HR). Education is also one of the basic capital as well as the key to the success of development in an area. This research aims to (1) describe education policy in Education Office of Sumenep Regency; (2) to explain the process of implementation of education policy in Education Office of Sumenep Regency; and (3) to identify the supporting and inhibiting factors of the implementation of education policy in the Education Office of Sumenep Regency. This research is a qualitative research with descriptive design. Data collection techniques used are: (1) literature study / literature and documentation; (2) interview; and (3) observation. As for the data analysis techniques used are: (1) data collection; (2) data reduction; (3) data presentation; and (4) conclusions or verifications. Checking data used in this research are: (1) credibility; (2) transperability; (3) dependability; and (4) confirmability. The results of the study describe the education policy implemented by the Education Office Sumenep has been running quite well, where it has been very concerned about educational issues. However, in its implementation in the field still encountered obstacles, one of which is still a lack of public understanding of the importance of education, especially in rural areas.

Keywords: Education Policy, Implementation, Compulsory Nine Years of Study

Abstrak: Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan juga merupakan salah satu modal dasar sekaligus menjadi kunci keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Peneliti ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan kebijakan pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep; (2) menjelaskan proses implementasi kebijakan pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep; dan (3) mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) studi pustaka/ literatur dan dokumentasi; (2) wawancara; dan (3) observasi. Sedangkan untuk teknik analisis datanya yang digunakan adalah: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; dan (4) kesimpulan atau verifikasi. Pengecekan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) kredibilitas; (2) transperabilitas; (3) dependabilitas; dan (4) konfirmabilitas. Hasil penelitian mendeskripsikan kebijakan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Sumenep telah berjalan cukup baik, dimana pihaknya sudah sangat perhatian terhadap permasalahan pendidikan. Meski demikian, dalam implementasinya di lapangan masih menemui kendala, salah satunya masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, terutama di daerah pedesaan.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Implementasi, Wajib Belajar Sembilan Tahun.

Konsep pendidikan di Indonesia secara konstitusional telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, dengan pokok kalimat utama "mencerdaskan kehidupan bangsa". Kalimat ini bermakna bahwa pendidikan merupakan salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsep pendidikan nasional dalam Undang-Undang

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas dinyatakan bahwa "pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab". Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan setiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku tertentu baik (Hasanah et al., 2017).

Salah satu sektor penting yang secara langsung memberikan kontribusi terbesar dalam mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sektor pendidikan (Dewi, 2014). Pemberian otonomi atau kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan diharapkan mampu memandirikan daerah (Aulia, n.d.). Berdasarkan landasan konstitusional di atas, menunjukkan bahwa pendidikan nasional merupakan pendidikan diberikan kepada masyarakat yang diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan, watak serta peradaban sehingga manusia Indonesia akan bermartabat dalam kehidupannya melalui perkembangan potensi, disertai dengan akhlak mulia, kecakapan, kreatifitas dan kemandirian dalam suatu negara. Sebagaimana pernyataan berikut "*Learning is the accumulated knowledge acquired from the experiences of individuals*" (Bahc, 2018). Persoalan yang dihadapi, bahwa sistem pendidikan di Indonesia walaupun dalam konstitusi sudah memiliki landasan yang kuat, tetapi pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan sesuai harapan. Persoalan ini ditemui, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi pendidikan di Indonesia, di antaranya; belum semua masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan sebagaimana diamankan dalam Undang-Undang. "*The nature, form and social context of these significant learning experiences are examined, with a particular focus on empowerment and transformation*" (Antikainen, 1998).

Permasalahan lain yang dihadapi adalah masalah pelayanan pendidikan, belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Roche "*One of the risks in expecting so much of education is that we lose sight of its agents*" (Roche, 2017).

Pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat semestinya diimplementasikan sesuai konstitusi yang ada, karena pada dasarnya pendidikan itu bukan saja hak kalangan tertentu, tetapi wajib diberikan kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata. "*In a world where knowledge has become a key resource, governments have realized about the importance of developing the intellectual capital of their citizens*" (Waleska & Díaz, 2010). Kepentingan ini berkenaan dengan tujuan bangsa yang semestinya direalisasikan dengan baik melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.

"Kebijakan publik" dibuat dan dilaksanakan pada semua tingkatan pemerintahan, karenanya tanggungjawab para pembuat kebijakan akan berbeda pada setiap tingkatan sesuai dengan kewenangannya. "*Governments have a role to play in provision.*" (Rogers, 2018). Dari gambaran kondisi tersebut, proses pembuatan kebijakan dan berbagai pertimbangan yang meliputinya, khususnya terkait dengan tahapan perumusan kebijakan (*policy formulation*).

Program Pendidikan Dasar Sembilan tahun merupakan upaya pemerintah untuk membekali anak dengan keterampilan dasar (Eryanto, 2014). Selain itu tujuan lain adalah untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat (Terhadap, Wajib, Tahun, Maldini, & Tjahjono, 2013). Melalui pendidikan pula kita dapat meningkatkan taraf hidup seseorang, yang mana taraf hidup seseorang akan berubah bilamana tingkatan jenjang pendidikan mereka semakin tinggi, dan itu secara sendirinya akan memacu seseorang untuk merubah taraf hidup yang rendah ke arah yang semakin baik (Yusta & Pradata, 2015). Pengkajian ulang dan penemuan pemecahan tentang penuntasan wajib belajar 9 tahun secara komprehensif dan mendalam sangat penting dilakukan karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat (Ulfatin & Imron, n.d.). Tidak hanya sekolah sebagai representasi negara yang menjadi penanggung jawab sentral pendidikan, tetapi masih ada unsur lain, yaitu peserta didik dan masyarakat

(Sumarno, 2016). Kebijakan sebagai tindakan didesain secara sengaja, relatif stabil dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama". Kebijakan publik menurut Anderson dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah serta memiliki dampak secara substansial terhadap masyarakat. Setiap perkembangan dan kemajuan kebijakan yang sedang dilaksanakan ataupun sudah dilaksanakan, sangat diperlukan suatu proses evaluasi guna mencapai hasil yang lebih efisien dan efektif (Elyasa, 2006).

Dari pendapat kedua ahli kebijakan tersebut, menunjukkan bahwa perumusan dan implementasi kebijakan merupakan fungsi penting dari sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat dan memadai. Kemampuan dan pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuat kebijakan publik terhadap kewenangan dimilikinya, termasuk kebijakan pendidikan di daerah.

Otonomi pendidikan merupakan kepercayaan yang tinggi diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal dengan tanpa mengabaikan tujuan pendidikan secara nasional. "*Growth in life-long learning orientations was facilitated by instruction that included opportunities for reflection, active learning, and perspective-taking and that provided students with opportunities for positively interacting with diverse peers*" (Mayhew, Wolniak, & Pascarella, 2008). "*Ethics has long been a formal academic discipline*" (Song, 2011). Sejalan dengan dinamika tuntutan reformasi saat ini, pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diatur Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 12 dan Pasal 14), pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk mengelola program pendidikan dengan baik. Tiga hal yang berkaitan dengan desentralisasi pendidikan, yaitu; (1) pembangunan masyarakat demokrasi; (2) pengembangan kapital sosial; dan (3) peningkatan daya

saing bangsa. Pendidikan merupakan salah satu sektor bidang pembangunan yang didesentralisasikan. Pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat membangun penyelenggaraan pendidikan yang layak bagi anak didik di wilayahnya.

Di era otonomi dan desentralisasi saat ini dituntut adanya perubahan, penyesuaian dan mungkin pembaruan untuk menciptakan kemandirian dalam rangka membangun daerahnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Hal ini diharapkan dapat mengarahkan perhatian untuk mendorong semangat partisipasi masyarakat dengan tidak menghilangkan wawasan nasional, sehingga mampu menunjukkan jati diri sebuah bangsa dengan mengedepankan rasa cinta tanah air dengan membawa model budaya yang beragam.

Untuk melaksanakan sejumlah harapan di atas, maka paling tidak ada tiga prinsip atau azas yang harus selalu diperhatikan yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi, menuntut setiap penyelenggara dan pengelola pendidikan melibatkan *stakeholder* dalam perumusan berbagai kebijakan. Transparansi mengharuskan satuan pendidikan untuk terbuka, terutama dalam pemerolehan dan penggunaan dana, sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Transparansi tidak akan terjadi tanpa didukung oleh akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pihak satuan pendidikan terhadap orangtua dan masyarakat, tidak hanya dalam aspek pengelolaan sumber-sumber daya, namun juga dalam proses pelayanan yang mereka berikan. Kewenangan yang begitu luas diberikan untuk daerah pada gilirannya menuntut setiap satuan pendidikan mereformasi dirinya, salah satunya di Kabupaten Sumenep.

Kabupaten Sumenep sebagai kabupaten paling ujung di Pulau Madura dengan wilayah kepulauan terluas di Jawa Timur mempunyai keunikan tersendiri baik dari segi sosial budaya, bahasa, maupun kondisi geografisnya. Tingkah pola masyarakatnya yang selalu menjunjung tinggi tata krama serta keramahan kepada

setiap tamunya maupun kondisi geografis alamnya yang selalu memberikan keramahan dan kenyamanan bagi siapapun yang berkunjung. Di samping itu, masyarakat Kabupaten Sumenep adalah komunitas yang memiliki identitas kultural yang khas. Mereka memiliki kebanggaan dengan identitas itu. Baik warga pribumi maupun warga keturunan Cina dan Arab, memiliki kebanggaan dengan identitas kultur baik dari segi kebahasaan, tata pergaulan, hubungan patron-klien, bahkan keagamaan, sehingga secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap dasar dan implementasi kebijakan yang digulirkan.

Di samping itu, dari oservasi lapangan ditemukan isu dan permasalahan pendidikan yang berkembang di Kabupaten Sumenep saat ini. Adapun isu tersebut adalah masalah rendahnya tingkat pendidikan, yang seolah tidak pernah ada habisnya untuk diperbincangkan dan ditelisik lebih jauh. Hal ini dapat dilihat dari Rata-rata Lama Sekolah saat ini masih baru mencapai 7,55 tahun setara dengan SMP kelas 2, Angka Melek Huruf saat ini masih berada pada 86%, artinya masih ada 14% penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Sumenep yang buta huruf, serta angka drop out (putus sekolah) tahun 2015 SD ke SMP sebesar 580 dan SMP ke SMA 2190. (Data Makro Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun 2016:13)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep lebih lanjut menambahkan permasalahan pendidikan di Sumenep, terutama di daerah pedesaan:

“Khususnya di daerah pedesaan, pertama banyak anak-anak yang belum saatnya menikah mereka menikah, kedua yang harusnya dibangku sekolah mereka harus keluar, karena pencahariannya bertani dan menjadi nelayan sehingga anak-anak dituntut untuk ikut berusaha membantu ekonomi keluarga. (AS, 08 Maret 2017).

Terkait dengan hal tersebut, kebijakan oleh Dinas Pendidikan yang efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat sangat diharapkan demi kualitas pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Sumenep. Mengingat pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan

kualitas sumber daya manusia (SDM). Bahkan pendidikan merupakan salah satu modal dasar sekaligus menjadi kunci keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian Tesis dengan judul “Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep)”

Dengan demikian, kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang yang dijadikan panduan dalam pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan yng moderat.

Kebijakan sebagai tindakan yang didesain secara sengaja relatif stabil yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama”. Kebijakan publik menurut Anderson dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah serta memiliki dampak secara substansial terhadap masyarakat.

Pengukuran Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle (Rusdiana, 2015:132) implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi berkaitan dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh apa dalam sesuatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang penting, kemungkinan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.

Setelah kebijakan dirumuskan, disahkan dan dikomunikasikan kepada khalayak, kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan. Implementasi ini adalah aktualisasi kebijakan pendidikan yang telah disahkan, bergantung cara pelaksanaannya di lapangan. Tolok ukur keberhasilan kebijakan pendidikan adapa pada implementasinya. Menurut Imron (Rusdiana, 2015:146) sebaik apapun rumusan kebijakan, jika tidak diimplementasikan, tidak akan diraakan gunanya. Sebaliknya, sesederhana apapun rumusan kebijakan, jika sudah diimplementasikan akan lebih berguna, apapun dan seberapapun gunanya.

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin

(dalam Widodo, 2001:12) didasarkan pada tiga aspek, yaitu: (1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang, (2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta (3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah. Sedangkan menurut Goggin et al. (dalam Widodo, 2001:14), proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel: (1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal, (2) kapasitas pusat/negara, dan (3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah. Variabel dorongan dan paksaan pada tingkat pusat ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin sah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di mata daerah maka semakin besar kredibilitasnya, begitu pula sebaliknya.

Selain kriteria pengukuran implementasi kebijakan di atas, perlu pula dipahami adanya hubungan pengaruh antara implementasi kebijakan dengan faktor lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (Grindle, 1980:6) bahwa terdapat variabel bebas saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja. Variabel dimaksud oleh keduanya meliputi; (1) ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumber kebijakan, (3) ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, (4) komunikasi antar organisasi terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan, (5) sikap para pelaksana, dan (6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Menurut Quade (dalam Siswanto, 2012:85), dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan dan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Dari transaksi itu diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

Dari beberapa pendapat diatas, tentang implementasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa berhasil tidaknya implementasi

sebuah kebijakan dapat diukur pada beberapa variabel diantaranya; (1) variabel sulitnya suatu masalah dikendalikan mencakup: (a) kesukaran teknis, (b) keragaman perilaku kelompok sasaran, (c) persentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk, dan (d) ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan. (2) Variabel kemampuan kebijakan mensistematisasi proses implementasi mencakup: (a) kejelasan dan konsistensi tujuan, (b) ketepatan alokasi sumber daya, (c) keterpaduan hirarkhi dalam dan di antara lembaga pelaksana, (d) aturan keputusan dari badan pelaksana, (e) rekrutmen pejabat pelaksana, dan (f) akses formal pihak luar. (3) Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi mencakup: (a) kondisi sosial ekonomi dan teknologi, (b) dukungan publik, (c) sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok, (d) dukungan dari pejabat atasan, dan (e) komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana.

Kebijakan merupakan proses olah pikir suatu program pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk implementasi melalui perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi. Melalui kegiatan evaluasi pembuat kebijakan akan mengetahui sejauhmana kebijakan telah dirumuskan dapat berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Menurut Abidin (2006:211) "evaluasi kebijakan secara lengkap terdiri atas: (a) evaluasi awal, b) evaluasi proses dan c) evaluasi akhir".

Evaluasi awal adalah evaluasi dilaksanakan sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan (*ex-ante evaluation*). Evaluasi proses adalah evaluasi tentang pelaksanaan atau monitoring kegiatan yang sedang dilakukan. Selanjutnya evaluasi akhir, dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (*ex-post evaluation*). Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan alasan bahwa tidak semua program kebijakan publik mencapai hasil sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kebijakan publik seringkali terjadi kegagalan dalam meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu seorang pembuat kebijakan wajib melakukan evaluasi untuk mengintrefeksi kebijakan

yang telah dirumuskan, apakah berhasil atau tidak. Wibawa dkk (2001: 9) mengemukakan evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan, dan efektifitas dampak kebijakan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa proses evaluasi merupakan aspek yang sangat penting untuk melihat keberhasilan dan atau kegagalan sebuah kebijakan yang telah dirumuskan. Fungsi evaluasi kebijakan sangat berguna untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja kebijakan, terutama berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, dan ketepatan pertanggungjawaban anggarannya.

Menurut Rusdiana (2015:47), sebagai sebuah proses, kebijakan pendidikan terdiri dari empat tahapan yang berbeda meskipun saling terkait yaitu : perencanaan (planning), perumusan (formulation), pelaksanaan (implementation) dan evaluasi (evaluation).

Lebih lanjut Rusdiana (2015:42) menyebutkan para perencana kebijakan pendidikan menggunakan berbagai teori serta pendekatan dan mengasumsikan berbagai peran pada masalah pendidikan yang berbeda-beda atau berbagai tipe praktek kebijakan pendidikan. Namun, umumnya para perencana melakukan tugas yang sama dalam dua langkah praktek kebijakan yaitu analisis kebijakan dan pelaksanaan perencanaan.

Selama tahap analisis kebijakan, perencana kebijakan mencoba untuk mendefinisikan masalah pendidikan, identifikasi berbagai isu kunci kebijakan, analisa sejarah berbagai isu kebijakan dan berusaha untuk menyelesaikan masalah, identifikasi pemain kunci dan lembaga pengambil keputusan, model proses pengambilan keputusan, mensintesis informasi dan membuat rekomendasi.

Memahami lingkungan sosial-ekonomi dari permasalahan pendidikan dan klien merupakan suatu hal yang sangat penting dalam analisis kebijakan. Tipe tugas dalam analisis kebijakan dapat dikelompokkan ke dalam empat fase berikut; analisis masalah dan intervensi, perumusan dari

tindakan yang berorientasi pada rekomendasi kebijakan, mengkomunikasikan rekomendasi tersebut kepada klien dan umpan balik (Rusdiana, 2015:43).

Jika rekomendasi untuk intervensi sudah disetujui, perencana kebijakan kemudian dapat merencanakan pelaksanaan. Selama tahap pelaksanaan perencanaan ini, perencana kebijakan berusaha mengorganisir pelaksanaan, melaksanakan dan memantau program, mengevaluasi hasil dan menyelaraskan tugasnya melalui mekanisme umpan balik.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah memberi kebebasan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri bukan berarti bahwa kebijakan pendidikan pada level nasional terputus dengan kebijakan lokal daerah. Kebijakan nasional tetap menjadi pijakan dan dasar acuan dalam perumusan implementasi kebijakan pada tingkat daerah, lokal, dan sekolah terutama bagi negara yang berbentuk kesatuan. Maka upaya pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mengikuti, mengimbangi, dan mampu memanfaatkan peluang yang dihasilkan oleh proses globalisasi dengan mengarahkan semua potensi masyarakat, pemerintah, dan negara untuk menghasilkan proses dan produksi pendidikan nasional yang berkualitas.

Untuk itu sangat diperlukan adanya perbaikan sistem dan perencanaan pendidikan bukan berarti pendidikan harus "siap pakai" seperti banyak didiskusikan pada akhir-akhir ini, yang dimaksud dengan "term" siap pakai melainkan lembaga pendidikan di masing-masing daerah memberikan bekal kepada peserta didiknya agar dapat memiliki kemampuan "menyesuaikan diri" (siap suai, ready for orientation) secara cepat dalam menghadapi persoalan rutin di bidang yang dipelajarinya dan mengembangkan cara baru untuk mengatasi beberapa persoalan teknis yang sudah berkembang di lapangan (Salladien, 1996:62).

Dalam kenyataan, kebijakan pendidikan yang diimplementasikan tidak serta merta diterima oleh guru begitu saja, akan tetapi selalu disaring (filtered). Bahkan guru cenderung melaksanakan hanya bagian bagian yang sesuai dengan perspektif

pribadi dan intuisi guru berdasarkan pengalaman dan pemahaman mereka (Smith, 2003: 48). Kemampuan memodifikasi kebijakan merupakan hasil kreatif guru yang terbentuk melalui pendidikan demokratis dan diwujudkan dalam tindakan otonom, maka berdasarkan pandangan tersebut Visi pendidikan harus diarahkan untuk menyelesaikan berbagai masalah serta diarahkan untuk menyesuaikan terhadap perubahan paradigma.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut maka untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan diperlukan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, demikian pula untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan kejuruan sangat diperlukan adanya kesesuaian dengan kebutuhan dunia kerja atau dunia usaha industri.

Menurut Gupta (Rusdiana, 2015:133) proses implementasi kebijakan pendidikan adalah tahapan yang dilakukan setelah suatu kebijakan diadopsi atau disahkan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam kebijakan bersangkutan. Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan sering dikaitkan dengan proses administratif, yang di dalamnya ditemukan banyak proses dan aktivitas organisasional dalam proses dan pendekatan yang dilakukannya, sehingga tidak berlebihan ketika di lapangan ditemukan hal-hal yang mendukung bahkan yang menghambat dalam pengimplementasiannya.

Berkaitan dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi proses implementasi kebijakan, Hogwood dan Gun (Rusdiana, 2015:140) menegaskan bahwa kebijakan apapun sebenarnya mengandung risiko untuk gagal. Ia membagi pengertian kegagalan kebijakan dalam dua kategori, yaitu *non-implementation* (tidak terimplementasi) dan *unsuccesfull* (implementasi yang tidak berhasil).

Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa kebijakan tidak dilaksanakansesuai rencana. Hal ini dimungkinkan karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau permasalahan yang

dibuat di luar jangkauan kekuasaannya. Betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup ditanggulangi. Akibatnya, implemtasi yang efektif sukar dipenuhi.

Salah satu tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya. Oleh karena itu, Weimer 1998 (Rusdiana, 2015:140) tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Sekalipun demikian, bukan berarti implementasi kebijakan terpisah dengan formulasinya, melainkan keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada tatanan kebijakan (*macro policy* dan *micro policy*).

METODE

Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, salah satunya bahwa masalah implementasi kebijakan pendidikan di Dinas Kabupaten Sumenep merupakan masalah yang masih remang-remang. Karena itu peneliti akan berusaha untuk melakukan penjelajahan dengan *a grant tour questions* sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas. Implementasi kebijakan sulit untuk dipahami kalau tidak diteliti dengan metode kualitatif, sehingga penggunaan berbagai metode empiris, seperti observasi, wawancara serta berusaha untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain atau sebagai instrumen dalam penelitian adalah si peneliti langsung.

Penelitian tentang implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep lebih bersifat lokalitas, sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah "metode kasus". Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan diri untuk mengetahui kekhususan (*particularities*) dari implementasi kebijakan pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Menurut Denzin dan Guba (1985), penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus memfokuskan dirinya untuk mengetahui hal-hal yang umum (*diversity*) dan kekhususan (*particularities*) dari objek studi yang menjadi sasaran penelitiannya. Namun hasil akhir yang ingin dicapai adalah penjelasan tentang keunikan dari kasus yang diamati.

Fenomena yang diteliti sangat kompleks sehingga membutuhkan pendekatan deskriptif yang utuh dan apa adanya.

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian maka perlu ditentukan informan penelitian sebagai sumber data primer dalam penelitian kualitatif. Informan penelitian adalah orang-orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki beberapa informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan informan biasa adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan. Oleh karena itu, dalam menentukan informan penelitian ini, digunakan dua teknik yaitu dengan menggunakan teknik purposive sampling dan juga menggunakan teknik *snowball sampling*. Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya yaitu; (1) Studi Pustaka/ Literatur dan Dokumentasi; (2) Wawancara; (3) Observasi/ Pengamatan Langsung. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan deskriptif kualitatif. Langkah-langkah model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (2009:15-19) yang meliputi: 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data dan 4) penarikan kesimpulan / verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan juga merupakan salah satu modal dasar sekaligus menjadi kunci keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Pendidikan juga memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi yang berkualitas untuk kepentingan masa depan, sehingga manakala tingkat pendidikan dikatakan tinggi setidaknya menggambarkan pola pikir dan peradaban masyarakat di suatu daerah tersebut.

Dalam pengukuran pembangunan manusia dalam bidang pendidikan, indikator yang digunakan adalah angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf.

Dari hasil temuan lapangan serta dikuatkan oleh pernyataan informan diketahui bahwa Kabupaten Sumenep saat ini angka rata-rata lama sekolahnya masih berkisar di angka 7,55 tahun, dimana hal ini setara dengan kelas dua SMP. Padahal idealnya rata-rata lama sekolah seharusnya bisa melebihi angka sembilan tahun sehingga pencanangan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dapat dikatakan berhasil. Sementara angka melek huruf di Kabupaten Sumenep baru mencapai 86 persen dimana masih ada 4 persen masyarakat yang berusia di atas 10 tahun yang mengalami buta huruf. Terkait buta huruf, memang realita di lapangan saat ini tidak memungkinkan bagi Kabupaten Sumenep untuk bisa mencapai 100% angka melek huruf. Hal ini dikarenakan masyarakat yang buta huruf merupakan penduduk yang berusia lanjut di atas 60-70 tahun. Jangka panjang diharapkan Kabupaten Sumenep bisa memberantas angka buta huruf di daerahnya. Selain itu pula, masih dijumpai adanya anak putus sekolah terutama banyak terjadi di wilayah pedesaan yang minim sarana dan prasarana sekolah yang menyebabkan masyarakat menjadi susah serta jauh dalam menjangkau akses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dimana hal tersebut membutuhkan biaya transportasi atau ongkos dalam menjangkau sekolah lanjutan tersebut. Sementara banyak penduduk secara ekonomi dapat dikategorikan miskin dan tidak mampu dalam membiayai ongkos transportasi anak-anak mereka yang akan sekolah jauh dari domisili tempat tinggal mereka dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya putus sekolah.

Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumenep tahun 2016 (RKPD Kabupaten Sumenep tahun 2016) dikatakan bahwa permasalahan pendidikan di Kabupaten Sumenep adalah tingkat pendidikan masyarakat masih rendah sesuai dengan indikator yang digunakan yaitu angka rata-rata lama sekolah dan angka melek

huruf seperti telah diungkapkan sebelumnya.

Kebijakan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Sumenep

Berdasarkan hasil temuan lapangan terkait dengan permasalahan pendidikan di Kabupaten Sumenep, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep mengambil beberapa kebijakan diantaranya sebagai berikut.

a. Kebijakan umum, terdiri dari:

- 1) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; Program turunan dari pemerintah pusat bahwa setiap anak usia sekolah harus sudah menyelesaikan pendidikan dasarnya selama sembilan tahun
- 2) Kebijakan SD-SMP terpadu satu atap; Kebijakan untuk mendekatkan sarana sekolah SMP kepada masyarakat di daerah-daerah minim akses transportasi umum dengan mendirikan SMP satu lokasi dengan SD sehingga siswa setelah lulus SD bisa langsung melanjutkan ke SMP di lokasi yang sama/berdekatan.
- 3) Kebijakan pendidikan gratis, anggaran bersumber dari dana BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah. Kebijakan ini diperuntukan bagi siswa SD dan SMP.

b. Kebijakan lokal, terdiri dari:

- 1) Program kurikulum BTQ, Program pengenalan dan pembiasaan baca tulis Al Qur'an sejak dini, hal ini sejalan dengan karakter budaya masyarakat Sumenep yang mayoritas beragama Islam.
- 2) Kebijakan pengaturan jajanan anak sekolah. Anak-anak dihibau untuk membawa bekal makanan sehat dari rumah yang dipersiapkan oleh orang tuanya untuk menghindari risiko terhadap jajanan sekolah yang tidak sehat karena banyak mengandung bahan kimia berbahaya. Selain itu anak-anak dilatih jiwa sosialnya dengan saling berbagi bekal makanan yang dibawanya dari rumah.

Dari kebijakan tersebut di atas, kebijakan yang langsung berpengaruh pada peningkatan indikator penghitungan indeks pembangunan manusia hanya

kebijakan umum yang menjadi turunan dari pemerintah pusat, sementara kebijakan lokal merupakan penguatan terhadap karakter budaya dan kesalehan pendidikan anak sekolah di Kabupaten Sumenep.

Implementasi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Sumenep

a. Kebijakan Umum

- 1) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; tidak bersifat paksaan, tidak ada sanksi hukum, tidak diatur dengan undang-undang tersendiri, keberhasilan hanya diukur dengan angka partisipasi meningkat.
- 2) Kebijakan SD-SMP terpadu satu atap; sudah dilakukan di beberapa wilayah pedesaan terisolir, seperti di Kecamatan Batang-Batang.
- 3) Kebijakan pendidikan gratis; diperuntukan bagi siswa SD dan SMP.

b. Kebijakan Lokal

- 1) Program kurikulum BTQ; digulirkan awal Tahun Pelajaran 2016/2017 dimasukkan ke Muatan Lokal, terdapat tambahan jam pelajaran, belum optimal, masih berproses.
- 2) Kebijakan pengaturan jajanan anak sekolah; masih belum optimal, baru digulirkan awal semester genap Tahun Ajaran 2016/2017, masih ditemui kendala terutama di wilayah pedesaan.

Dalam pelaksanaannya dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep sudah cukup baik dimana Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep sudah sangat peduli terhadap peningkatan pendidikan di daerahnya. Selain itu, partisipasi sekolah dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Sumenep sudah dilakukan melalui mekanisme kegiatan sosialisasi oleh sekolah-sekolah, kemudian dibawa ke UPT Pendidikan kecamatan hingga Dinas Pendidikan.

Meski dalam kegiatan sosialisasi tersebut sekolah hanya sekedar bisa memberikan rekomendasi atau masukan saja bagi Dinas Pendidikan dalam merumuskan serta memutuskan kebijakan atau program-program pendidikan, tetapi

setidaknya sekolah bersama masyarakat diberikan kesempatan melalui kegiatan tersebut untuk mengutarakan pendapat serta aspirasinya perihal masalah pendidikan tentang kebutuhan dan pengembangan di wilayahnya masing-masing. Di samping, Dinas Pendidikan melakukan kegiatan evaluasi rutin ke bawah. Oleh karena itu, dapat dikatakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep telah melakukan kegiatan perencanaan secara partisipatif. Selain itu masyarakat juga bisa menjadi kontrol sosial bagi penyelenggara pendidikan, jika terdapat kebijakan yang tidak sesuai bisa langsung ditanyakan atau diluruskan. Kemudian masyarakat juga bisa menilai secara langsung terkait program atau kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan karena yang merasakan dan bersentuhan secara langsung terhadap program atau kebijakan dan permasalahan pendidikan di lapangan adalah masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat pada Kebijakan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dalam Meningkatkan Pendidikan di Kabupaten Sumenep

Kebijakan pendidikan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dalam upaya meningkatkan pendidikan di Kabupaten Sumenep memiliki beberapa faktor pendukung diantaranya sebagai berikut.

Pertama, ketersediaan sarana untuk sekolah dan media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Selain kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah-sekolah dalam menyerap aspirasi serta keluhan masyarakat secara langsung, sarana komunikasi antara Dinas Pendidikan dan masyarakat dilakukan dengan kegiatan evaluasi rutin setiap bulan oleh Dinas Pendidikan.

Kedua, ketersediaan alokasi anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD. Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep sudah sangat peduli dengan pendidikan, hal ini terlihat dari pengalokasian anggaran untuk kegiatan dalam bidang pendidikan yang bersumber dari APBD dimana jumlahnya sudah lebih dari 20 persen

sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Ketiga, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dalam implementasi kebijakan pendidikan. Dari total jumlah pegawai negeri di Kabupaten Sumenep yang berjumlah 12 ribu orang, lebih dari setengahnya merupakan pegawai dinas pendidikan dalam hal ini merupakan tenaga pengajar (guru) sehingga dapat dikatakan jumlah sumber daya manusia dalam bidang pendidikan sudah sangat lebih dari cukup.

Di sisi lain, kebijakan pendidikan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dalam upaya meningkatkan pendidikan di Kabupaten Sumenep juga masih menemui beberapa hambatan, diantaranya sebagai berikut.

Pertama, persebaran tenaga pengajar yang belum merata. Kenyataan yang ada saat ini jumlah tenaga pengajar yang berkualitas lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara di pedesaan khususnya di daerah kepulauan masih sangat minim jumlahnya.

Kedua, pemahaman masyarakat terhadap pendidikan dan kebijakan pendidikan yang masih kurang dan belum merata. Hal ini terutama terjadi di wilayah pedesaan, dimana tingkat pendidikan masyarakatnya juga cenderung masih rendah sehingga berpengaruh terhadap pola pikirnya. Karena yang paling banyak dalam memberikan kontribusi terhadap rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Sumenep berada pada masyarakat pedesaan.

Ketiga, ketidakjelasan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah (kabupaten), sehingga seolah terjadi gap di antara mereka.

KESIMPULAN

Secara garis besar berdasarkan tahapan-tahapan proses kebijakan yang ada dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep telah melakukan tahapan proses kebijakan tersebut dengan cukup baik. Mulai dari identifikasi permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Sumenep di mana salah

satunya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi guna menampung aspirasi serta permasalahan yang terjadi di masyarakat, merumuskan serta merekomendasikan intervensi berupa kebijakan atau program pendidikan, melaksanakan dan memantau program tersebut di lapangan, sampai pada penilaian kebijakan.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan juga melakukan komunikasi rekomendasi program yang ada kepada PEMDA dan DPRD untuk mendapatkan penjelasan dasar kebijakan dan persetujuan dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD. Sementara dari segi perencanaan, Dinas Pendidikan telah melakukan perencanaan partisipatif atau bottom-up planning dengan melibatkan sekolah bersama masyarakat dari tingkat yang paling bawah melalui sosialisasi hingga ke UPT Pendidikan.

Meski demikian, dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di lapangan masih menemui beberapa hambatan, salah satunya terkait dengan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan terutama terjadi di pedesaan.

Kemudian, untuk kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan saat ini hanya sekedar evaluasi terhadap penyerapan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang telah dibuat dengan tujuan pencapaian kegiatan atau program hanya berkisar pada terlaksananya atau terealisasinya kegiatan atau program dimana hal ini hanya berfokus pada tujuan pencapaian output semata.

SARAN

Berdasarkan hasil temuan lapangan, pembahasan hasil penelitian serta kesimpulan yang ada, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa saran yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep bersama segenap elemen yang terkait, diantaranya sebagai berikut.

1. Terkait persebaran tenaga pengajar yang kurang merata, saat ini jumlahnya lebih banyak terkonsentrasi di perkotaan, maka perlu adanya keberanian, ketegasan serta keseriusan dari Dinas Pendidikan

selaku instansi pembina para tenaga pengajar. Salah satunya dengan terus menerus memberikan pemahaman serta memotivasi kembali komitmen para tenaga pengajar agar siap ditempatkan di mana saja di seluruh Kabupaten Sumenep sebagai bagian dalam pengabdian mereka untuk mencerdaskan masyarakat di Kabupaten Sumenep yang berada di wilayah pedesaan khususnya di daerah Kepulauan. Dengan demikian, masalah akan minimnya tenaga pengajar berkualitas di wilayah pedesaan bisa teratasi dengan baik serta dapat meningkatkan kualitas lulusan sekolah di wilayah pedesaan khususnya di kepulauan.

2. Ketika dikeluhkan akan minimnya tenaga pengajar yang berkualitas di wilayah pedesaan saat ini, maka bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama atau bahkan lebih diprioritaskan bagi para tenaga pengajar yang berada di wilayah pedesaan untuk meningkatkan kualitas keterampilan serta keahlian mereka di berbagai bidang sehingga bisa menjadi percepatan peningkatan kualitas tenaga pengajar yang dampaknya akan dirasakan pula pada hasil kualitas lulusan sekolah di wilayah pedesaan.
3. Terkait pemahaman masyarakat yang masih kurang akan pentingnya pendidikan, perlu adanya edukasi secara berkesinambungan kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan dan waktu, sehingga jika masyarakat telah paham akan pentingnya pendidikan dengan sendirinya masyarakat akan sadar untuk ikut berpartisipasi dalam perkembangan pendidikan. Dengan meningkatnya partisipasi orang tua dalam menyekolahkan anaknya, maka secara otomatis indeks pembangunan manusia terutama dalam bidang pendidikan di Kabupaten Sumenep akan akan meningkat pula.
4. Perlu adanya intervensi Pemda Sumenep lebih jauh terhadap pemutakhiran data secara *up-to-date* agar validitas datanya bisa lebih diakui secara ilmiah karena dijumpai data-data yang diberikan terutama keluaran BPS Kabupaten Sumenep masih merupakan data lama.

Misalnya, buku Sumenep Dalam Angka Tahun 2015, diterbitkan tahun 2016 sementara isinya merupakan kumpulan data tahun 2013. Hal ini juga dikeluhkan oleh pihak Dinas Pendidikan sendiri sehingga pada akhirnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep membuat proyeksi data berdasarkan data beberapa tahun sebelumnya, sehingga data yang ditampilkan bukan merupakan data real sebenarnya.

5. Perlu adanya konsep evaluasi kebijakan atau program pendidikan secara lebih jelas, terperinci dan sederhana, sehingga kedepannya Bukan hanya sekedar evaluasi terhadap penyerapan anggaran atas terlaksananya atau terealisasinya kegiatan atau program, tetapi bisa lebih berfokus tidak hanya pada tujuan pencapaian output semata.

DAFTAR RUJUKAN

- Antikainen, A. R. I. (1998). *BETWEEN STRUCTURE AND SUBJECTIVITY: LIFE-HISTORIES AND LIFELONG LEARNING The biographical method in educational research The subject of life-as-lived , life-as-experienced and life-as-told has long inter- ested authors and researchers (Bruner 1986). Th. 44, 215–234.*
- Aulia, S. (n.d.). *Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan). 204–216.*
- Bahc, N. M. (2018). *Strategy for lifelong learning in vocational schools of tourism education. 43–58. https://doi.org/10.1007/s11135-017-0586-4*
- Ekonomi, J. P., & Ganesha, U. P. (2014). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK PUTUS SEKOLAH 2012 /2013.*
- Eryanto, H. (2014). *This study aimed to evaluate the Compulsory Basic Education Programme period 2008-2011 in Jakarta and knew the extent of the success of the program , and formulate policy recommendations to improve this activity in the future . This study uses the CIPP ev. XII, 44–82.*
- Hasanah, Y. M., Safruddin, C., Jabar, A., Pauh, T., Yogyakarta, U. N., Hasanah, Y. M., ... Yogyakarta, U. N. (2017). *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Online : http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Pendahuluan Pendidikan merupakan hal paling penting dan investasi masa yang akan datang dalam suatu negara . Pendidikan . 5(2), 228–239.*
- Mayhew, M. J., Wolniak, Æ. G. C., & Pascarella, Æ. E. T. (2008). *How Educational Practices Affect the Development of Life-long Learning Orientations in Traditionally-aged Undergraduate Students. 337–356. https://doi.org/10.1007/s11162-007-9081-4*
- Nomor, V., Menyelesaikan, U., Wajar, P., & Pendidikan, J. (2016). *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat camatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. 3(4), 38–47.*
- Provinsi, D. I., & Jakarta, D. K. I. (2006). *Implementasi program wajib belajar 12 tahun di provinsi dki jakarta (studi kota administrasi jakarta timur). 1–18.*
- Roche, S. (2017). *the value (and values) of lifelong learning. International Review of Education, 63(5), 623–629. https://doi.org/10.1007/s11159-017-9666-x*
- Rogers, A. (2018). *Adult learning in modern societies: An international comparison from a life-course perspective. International Review of Education, 64(6), 865–866. https://doi.org/10.1007/s11159-018-9741-y*
- Song, S. J. (2011). *An Ethical Approach to Life-long Learning: Implications for Global Psychiatry. (December), 391–396.*
- Terhadap, N., Wajib, K., Tahun, B., Maldini,

- F. Y., & Tjahjono, H. (2013). *Edu Geography*. 1(2).
- Wajib, P., Tahun, B., Alternatif, D. A. N., & Imron, A. (n.d.). *Profil wajib belajar 9 tahun dan alternatif penuntasannya*.
- Waleska, M., & Díaz, S. (2010). *An approach of marketing relationship graduate – University for universities configuration as life long learning centres : an application to the University of Valencia*. 191–193. <https://doi.org/10.1007/s12208-010-0048-3>
- Yusta, T., & Pradata, W. (2015). *EVALUSI PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN PADA MASYRAKAT MISKIN DI KELURAHAN WONOKUSUMO KECAMATAN SEMAMPIR*. 3, 176–185.